

# RENJA

## RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL



## BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN BOMBANA 2023

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT dan berkat kerjasama berbagai pihak Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana Tahun 2023 dapat kami Rampungkan. Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) merupakan salah satu Amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas Kerja sama Semua Pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung Rencana Kerja Badan kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bombana Tahun 2023 dapat terselesaikan sesuai jadwal.

Akhirnya dengan selesainya Rencana Kerja ini kami Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus Kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya,dan hanya kepada ALLAH kita memohon Ampun dan Ridho-Nya.Semoga Petunjuknya Selalu Menyertai derap pengabdian kita dalam membangun Masyarakat Kabupaten Bombana sesua Visi dan Misi Daerah Mewujudkan Bombana Sejahtera(Munajah) Tahun 2017-2022, Semoga Rancangan Renja Ini Bermanfaat adanya, Kritik dan Saran yang bersifat Kontruktif Kami Terima dengan baik.

Rumbia, April 2022

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
kabupaten Bombana**



**dr. H. SUNANDAR. A. RAHIM, MM.Kes**

Pembina Utama Muda Gol IV/c  
NIP. 19690716 2000031 004

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan program dan kegiatan pada jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana

mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen tertulis, seperti Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dokumen-dokumen tersebut ditulis dengan mengacu dan berpedoman kepada landasan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana. Rencana kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Bombana Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RENJA Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana tahun 2023 ini diharapkan memiliki sinergitas dengan program serta kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Selain itu, RENJA Badan Kesbangpol

Kabupaten Bombana ini merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. RENJA Tahun 2023 memuat penjabaran visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana pada tahun 2022. Dengan demikian, RENJA Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik dalam program dan kegiatan maupun penganggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana pada tahun 2023. Di samping untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, penyusunan RENJA Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana Tahun 2023 ini juga dimaksudkan untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui perencanaan dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.

## **2.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan Renja SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan : Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 nomor 144,Tambahan Lembaran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 20014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Undonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun.2022 Tentang Organisasi,dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;



18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 89 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan pejabat pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.

System Perencanaan Pembangunan Nasional Bertujuan Untuk:

- Mendukung Koordinasi antar Pelaku Pembangunan
- Menjamin terciptanya Integritas, Sinkronisasi, dan Strategi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan.
- Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat.
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya, Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan memegang peranan penting dalam melaksanakan Pembangunan bagi kepentingan rakyatnya. Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh sungguh dan penuh Tanggung Jawab, perlu di letakkan asas –asas penyelenggaraan Negara.

Landasan Hukum yang di berikan adalah UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menjalankan tugas- tugasnya dan dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, dan lebih spesifik di atur dalam Inmendagri Nomor 4



tahun 2005 tentang kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/Kota.

Landasan Hukum lainnya adalah PP no.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Permendagri No.54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Merupakan Dokumen Perencanaan taktis Strategis yang Menjabarkan Potret Permasalahan Pembangunan Untuk memecahkan Permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber Pembiayaan APBD,dengan mengutamakan kewenangan yang wajib di susun sesuai dengan Prioritas dan Kebutuhan daerah.Penjelasan ini berdasarkan PP No.108 Tahun 2000.Status Hukum Renstra dan Renja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 Pasal 4(3).dan kemudian di tetapkan dengan Peraturan Daerah( Perda).

Renstra Memiliki sejumlah Indicator sebagai berikut:

- Analisis Tentang situasi,yang meliputi antara lain Analisis Potensi Konflik horizontal,gangguan kantibmas serta dinamikadan visi Social politik yang berkembang di tengah- tengah masyarakat.
- PRB dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi,baik sector sector ekonomi Primer yang Membutuhkan Kebijakan yang Kondusif bagi pertumbuhannya maupun sector sector Ekonomi kerakyatan yang menumbuhkan Intervensi kebijakan berupa pelaksanaan program dan Gembira Desa,Kelurahan,Kecamatan dan Kota yang Memihak pada Masyarakat Kurang Mampu.
- Indeks regional,seperti misalnya Angka Indeks Pembangunan Manusia(IPM),Tingkat Pengangguran,angka Kemiskinan,angka putus sekolah,gejala kerusakan Ekosistem Lingkungan Hidup dan tata cara Ruang.
- Kebijakan daerah Jangka Menengah,sebagiman di Jabarkan dalam RPJMD.Renstra berfungsi sebagai Perencanaan Taktis

Strategis, yang di susun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta Indikator sebagaimana di sebutkan di atas.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Daerah di tuangkan dalam Renstra yang di tetapkan oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan rakyat daerah(DPRD) dalam Lima Tahunan. Selanjutnya Renstra di Rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) yang di tetapkan oleh Kepala Daerah Bersama DPRD setiap daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan tujuan penciptaan kondisi ketertiban, ketentraman dan sosial politik yang semakin kondusif. Mengarahkan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana strategik yang merupakan proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi, menjadi dokumen penting dan pedoman yang sangat efektif untuk :

- 1) Mengantisipasi secara proaktif perubahan lingkup kegiatan organisasi yang mungkin akan terjadi;
- 2) Menuntun unit kerja perangkat daerah dalam menyusun strategis yang berorientasi pada hasil melalui optimalisasi kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki organisasi;
- 3) Mendorong organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategik yang terjadi;

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi;
- 5) Memfasilitasi terciptanya komunikasi antar anggota organisasi, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dalam organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana di susun sebagai Berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Rencana Strategis, Analisis Kinerja pelayanan, Isu - Isu Penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik dan penelaah Usulan masyarakat Tahun 2023.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menggambarkan telaah terhadap Kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran serta Program dan kegiatan badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023.

##### **BAB IV. Penutup**

Menjelaskan Uraian antara lain berupa catatan –catatan penting dan kaidah –kaidah pelaksanaan serta rencana tindak Lanjut.

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;,, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2022 sampai dengan triwulan II meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu Renja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;

Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Terlampir.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Bahwa jenis pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM ) sampai saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bombana belum memperoleh SPM yang ditetapkan dan terbitkan oleh Pemerintah melalui Kementrian terkait yaitu Dirjen Kesbang Politik Pusat. Jadi dalam pelaksanaan tugas pelayanan dasar dibidang Pemerintahan, kemasyarakatan dan Pembangunan mengacu pada pengukuran pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana yaitu :

- 1). Peningkatkan kualitas infrastruktur Politik berupa fasilitasi dan sarana dan prasarana serta peningkatan suprastruktur politik melalui penguatan lembaga–lembaga legislatif dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah melalui pengembangan system koordinasi dan tindakan yang cepat dan tepat;
- 2). Mengoptimalkan pemahaman dan penguatan Nilai-Nilai Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan berkompeten dalam memberikan pemahaman pada masyarakat;
- 3). Terciptanya Rasa Aman, tentram dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga dan instansi lainnya untuk tetap terjaganya situasi dan stabilitas daerah;
- 4). Peningkatan Kapasitas ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam memelihara kerukunan Nasional yang diimplementasikan dalam pemeliharaan Nilai-Nilai seni/situs budaya,

penguatan forum – forum keagamaan, pemeliharaan sumber-sumber dan potensi ekonomi yang umumnya untuk terpeliharanya kerukunan nasional;

- 5). Meningkatkan Kapasitas aparatur kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan sehingga diperoleh aparatur yang berkualitas, bersih, jujur dan akuntabel, di dukung sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol kab Bombana Terlampir.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Sejauhmana tingkat pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah yang berkualitas dapat berjalan dengan baik ditunjang kualitas SDM yang handal serta jalur birokrasi yang tidak berbelit- belit.

Program antar lembaga antar pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada bidang Kesatuan Bangsa, pelayanan berjalan sinergik, bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

Permasalahan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana yang merupakan tantangan masa depan / yang akan dihadapi adalah :

- a. Lunturnya pemahaman nilai-nilai Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Rendahnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pemilukada;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung infrastruktur politik dan inprastruktur politik;

- d. Rendahnya koordinasi dan komunikasi terhadap unsur-unsur kekuatan bangsa dalam pembangunan demokrasi;
  - e. Rendahnya kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik;
  - f. Adanya gangguan keamanan dan teroris;
  - g. Terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi yang memicu lambatnya penyelesaian konflik antar daerah, baik menyangkut sara, etnis/ras dan agama;
  - h. Kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap nilai-nilai budaya daerah.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).

Kecenderungan dampak globalisasi dalam regionalisasi merupakan tantangan namun sekaligus juga sebagai peluang bagi proses pembangunan daerah dalam pencapaian visi, misi dimana setiap lembaga atau OPD akan menunjukkan peran dalam kompositif kesasaran dan terbuka yang dapat diakses oleh semua pihak sekaligus mendapat pengawasan langsung oleh masyarakat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.
- a. Tuntutan terhadap peningkatan peran serta seluruh komponen bangsa dalam berdemokrasi melalui forum dialog;
  - b. Paradigma pemerintahan sesuai kebutuhan riil instansi pemerintah daerah;
  - c. Kebijakan Nasional tentang pembinaan politik dalam negeri.
5. Formulasi isu-isu penting.

Perumusan Rencana Kerja Tahunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai prioritas dibidang Revitalisasi Pemerintahan Daerah yaitu; ***"Terwujudnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang Profesional dalam Membangun Masyarakat Kabupaten Bombana yang Demokratis dan Berwawasan Kebangsaan"***.



## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses Usulan/kegiatan setiap tahunnya oleh setiap pemangku kepentingan di peroleh dari hasil pertemuan sesuai tupoksi masing – masing bidang selain itu pula terdapat usulan Masyarakat pada Musrembang tingkat Desa Kelurahan,Kecamatan dan Kabupaten.
2. Proses Dilakukan usulan adalah berasal dari masyarakat desa dan kelurahan yang kemudian di teruskan ke kecamatan sampai pada kabupaten
3. Adapun ProgramKegiatan Yang Di usulkan RKPD berbeda hal ini di sebabkan oleh Usulan Masyarakat yang Mana Pada Tingkatan Pengambilan Kebijakan Usulan Tersebut Berubah Karena Di sesuaikan Dengan Kondisi Keuangan Daerah.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bidang – bidang setiap tahun penyampaian usulannya pada sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kemudian di teruskan pada kasubag Penyusunan Program,Hal ini memudahkan untuk percepatan pencapaian kinerja yang maksimal dandi rencanakan sesuai tupoksi dan kegiatan pada tahun berjalan sesuai kebutuhan masing-masing
2. Usulan Bidang kemudian di kaitkan dengan Isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.Hal ini kemudian di sikapi bahwa setiap momen atau usulan tidak lupa kami mengaitkan atau merelefansikan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana dengan Instansi lain yang terkait.termasuk propinsi dan Pusat.Program Kegiatan yang di maksud adalah tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai keterkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum di mana Tugas Pokok Instansi Bandan Kesbang dan Politik Kabupaten Bombana adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bombana adalah:

- a. Perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bombana
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan Umum
- c. Pemberian Tahapan Pelayanan Badan

**BAB III****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM  
PERUBAHAN RENJA SKPD****3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah perlu Menyiapkan Rencana pembangunan Jangka Panjang ( RPJP). Jangka Menengah (RPJM dan Rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan Oleh Unsur penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Polotik dan linmas Kabupaten Bombanan tahun 2023 adalah Dokumen Perencananaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Bomabana yang merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Nasional. Penyusunannya di lakukan secara Terencana, sistematis yang di dasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi, sesuai kebutuhan.

Visi pembangunan Kabupaten Bombana adalah **“Mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH) 2017-2022”**, makna sejahtera: **Masyarakat Kabupaten Bombana yang religious, berkeadilan, aman dan berbudaya**, untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Bombana sebagai penggerak dalam pembangunan Kantbtimnas di kabupaten bombana memiliki visi **“Terwujudnya kehidupan masyarakat yang Demokrasi, Tertib, Aman Bersatu Mandiri dan Berkaulitas di segala Aspek kehidupan.**

Visi ini mengandung pengertian bahwa di tahun mendatang Badan Kesatuan Bangsa politik dan linmas Kabupaten di harapkan dapat memenuhi keinginan dan amanat masyarakat untuk melakukan peningkatan kualitas dan pendayagunaan Aparatur, peningkatan pembangunan, pemantapan kesatuan, dan kesatuan nasional di daerah, meminimalisasi korban jiwa dan keringanan material akibat

bencana alam, peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meningkatkan kemitraan untuk meningkatkan peran dan fungsi DPRD, meningkatkan kualitas lembaga dan organisasi partai politik, memfasilitasi terciptanya ruang komunikasi yang baik dan benar antara pemerintah dan masyarakat, mengembangkan budaya politik masyarakat yang sadar hukum, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun pada perkembangannya dalam mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten Bombana tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Permasalahan-permasalahan pokok yang masih terjadi pada Badan Kesbang politik dan linmas Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut.

- a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum Memadai  
Tenaga aparat yang ada selain tidak merata penyebarannya di daerah juga kualitas SDM yang relative terbatas sehingga pelayanan kamtibmas terutama di daerah terpencil belum memadai. Oleh karenanya di perlukan pembinaan-pembinaan terhadap aparatur pemerintah untuk menjadi tenaga yang handal melalui pendidikan karakter dan penjenjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ketersediaan sumber dana yang sangat terbatas  
Sumber pendanaan Badan Kesbang politik dan linmas kabupaten Bombana berasal dari APBD yang tersedia setiap tahunnya.

### 3.2. Program Kerja Dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembangunan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

- 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dengan kegiatan sbb:**
  - a. Pelayanan Gaji dan Tunjangan PNS = **34,52 %**.
- 2. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan sbb:**
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat hingga triwulan II telah mencapai **49,39 %**;

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik = **69,33 %**;
- c. Penyediaan alat tulis kantor = **34,00 %**;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan = **80 %**;
- e. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor = **66,76 %**;
- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor = **33,33 %**;
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan = **30,45 %**;
- h. Penyediaan makan dan minum = **56,97 %**;
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah = **53,34 %**;
- j. Jasa pelayanan administrasi perkantoran = **25,00 %**;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan SKPD = **41,00 %**;
- l. Penyusunan laporan azet triwulan dan semesteran = **72,00 %**.

**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, dengan kegiatan sbb:**

- a. Pengadaan kendaraan jabatan 'tidak di anggarkan';
- b. Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional 'tidak dianggarkan';
- c. Pengadaan mobiler 'tidak dianggarkan';
- d. Pengadaan komputer'tidak dianggarkan';
- e. Pengadaan kamera 'tidak dianggarkan';
- f. Pengadaan warles 'tidak dianggarkan';
- g. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 'tidak dianggarkan';
- h. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional = **63,00 %**;
- i. Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan kantor = **46,73 %**;
- j. Publikasi 'tidak dianggarkan'.

**4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sbb:**

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 'tidak dianggarkan';
- b. Pengadaan pakaian korpri = **92,82 %**;
- c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 'tidak dianggarkan';

- d. Pengadaan pakaian olah raga 'tidak dianggarkan';
- e. Pengadaan mesin absensi 'tidak dianggarkan'.

**5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan sbb:**

- a. Pendidikan dan pelatihan non formal 'tidak dianggarkan';
- b. kursus – kursus 'tidak dianggarkan'.

**6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sbb:**

- a. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD =100%;

**7. Program Peningkatan Pengembangan sistem perencanaan SKPD, dengan kegiatan sbb:**

- a. Penyusunan rencana tahunan SKPD = 45 %;
- b. Perencanaan dan penyusunan serta Singkronisasi Program Kegiatan 'tidak dianggarkan';
- c. Forum komunikasi perencanaan 'tidak dianggarkan'.

**8. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan sbb :**

- a. Penyuluhan kepada masyarakat 'tidak dianggarkan';
- b. Koordinasi forum – forum diskusi politik 'tidak dianggarkan';
- c. Pendidikan politik generasi muda 'tidak dianggarkan';
- d. Forum Dialog Politik berbasis gender 'tidak dianggarkan';
- e. Verifikasi bantuan keuangan Parpol 'tidak dianggarkan';
- f. Koordinasi, monitoring dan perlengkapan PAM TPS 'tidak dianggarkan';
- g. Penyusunan data base partai politik 'tidak dianggarkan';
- h. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 'tidak dianggarkan';
- i. Bimbingan teknik/Bintek kapasitas calon anggota dan anggota legislatif 'tidak dianggarkan';
- k. Koordinasi dan monitoring Pilkada Serentak = 100 %.

**9. Program pengembangan wawasan kebangsaan dan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.**

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kedudukan budaya bangsa dalam peningkatan wawasan kebangsaan 'tidak dianggarkan';
- b. Orientasi pembauran bangsa bidang pendidikan 'tidak dianggarkan';
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan tataran dasar bela negara 'tidak dianggarkan';
- d. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 'tidak dianggarkan';
- e. Pameran dalam rangka HALO SULTRA 'tidak dianggarkan';
- f. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) 'tidak dianggarkan';
- g. Forum pembauran kebangsaan (FPK) (belum dilaksanakan = 0%);**
- h. Pencapaian halaqol dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 'tidak dianggarkan';
- i. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 'tidak dianggarkan';
- j. Fasilitasi kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 'tidak dianggarkan'.

**10. Program Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.**

- a. Melaksanakan pelestarian nilai budaya dengan inventarisasi adat seni dan budaya daerah 'tidak dianggarkan';
- b. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan kraton dan lembaga adat 'tidak dianggarkan';
- c. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat 'tidak dianggarkan';
- d. FKUB dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama (belum dilaksanakan = 0%);**
- e. Kelembagaan FKUB dengan dewan penasehat FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama 'tidak dianggarkan';
- f. Koordinasi dan ketahanan ekonomi pada instansi terkait 'tidak dianggarkan';
- g. Supervisi, penelitian dan konsultasi perencanaan pemantauan bidang ketahanan lembaga usaha ekonomi kerakyatan 'tidak dianggarkan';



- h. Mlaksanakan kegiatan ketahanan sumber daya alam, perdagangan, infestasi, fisik, dan moneter tentang perilaku masyarakat 'tidak dianggarkan';
- i. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan LSM 'tidak dianggarkan';
- j. Pencegahan penyalahgunaan narkoba 'tidak dianggarkan';
- k. Pembentukan forum-forum kearifan lokal dalam mengembangkan nilai budaya di masyarakat 'tidak dianggarkan'.

**11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,**

- a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah 'tidak dianggarkan';
- b. Forum kewaspadaan dini masyarakat = **100 %**;
- c. Deteksi Dini dan cegah dini gangguan trantibmas 'tidak dianggarkan';
- d. Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing 'tidak dianggarkan';
- e. Pembinaan Teritorial 'tidak dianggarkan';
- f. Forun Koordinasi Pencegahan teroris 'tidak dianggarkan';
- g. Rapat evaluasi Penanganan Konflik Sosial dan gangguan keamanan dalam negeri = **25 %**. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bombana Terlampir

Tabel T.C.33  
Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Prakiraan maju tahun 2024  
Kabupaten bombana

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar 1 Dari 4

KODE	Urusan/Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif
1	2	3	(14)		(15)			(17)	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
X XX 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Terlaksanya Program Penunjang pemerintah an daerah kabupaten Kota</b>	<b>Kab. Bombana</b>	<b>100</b>	<b>34,310,063,799</b>	<b>APBD</b>	<b>2,688</b>	<b>233,884,063,799</b>	
X XX 1 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	<b>Kab. Bombana</b>	-	<b>135,000,000</b>	<b>APBD</b>	<b>11</b>	<b>135,000,000</b>	
X XX 1 201 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bombana	5 Dokumen	50,000,000	APBD	5	50,000,000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

X	XX	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	20,000,000	APBD		1	20,000,000
X	XX	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1	5,000,000
X	XX	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1	5,000,000
X	XX	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1	5,000,000
X	XX	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bombana	1 Laporan	30,000,000	APBD		1	30,000,000
X	XX	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bombana	1 Laporan	20,000,000	APBD		1	20,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

X	XX	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah	0	86 Orang/Bulan	1,999,166,871	APBD		86	1,999,166,871
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bombana	22 Orang/12bulan	1,839,166,871	APBD		22/12	1,839,166,871
X	XX	1	202	2	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bombana	12 Dokumen	120,000,000	APBD		12	120,000,000
X	XX	1	202	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bombana	37 Laporan	20,000,000	APBD		37	20,000,000
X	XX	1	202	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bombana	37 Laporan	20,000,000	APBD		37	20,000,000
X	XX	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang	-	24 'Laporan	18,400,000	APBD		24	18,400,000
X	XX	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bombana	' 12 Laporan	10,000,000	APBD		12	10,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

X	XX	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bombana	12 Laporan	8,400,000	APBD		12	8,400,000
X	XX	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi kepegawaian		9 Paket	110,000,000	APBD		9	110,000,000
X	XX	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bombana	3 Paket	50,000,000	APBD		3	50,000,000
X	XX	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bombana	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1	10,000,000
X	XX	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bombana	5 Orang	50,000,000	APBD		5	50,000,000
X	XX	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Kegiatan	0	130 Paket	536,000,000	APBD		168	536,000,000
X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bombana	1 Paket	10,000,000	APBD		1	10,000,000
X	XX	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bombana	1 Paket	5,000,000	APBD		1	5,000,000
X	XX	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bombana	1 Paket	5,000,000	APBD		1	5,000,000
X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bombana	1 Paket	50,000,000	APBD		1	50,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bombana	4 Paket	30,000,000	APBD		4	30,000,000
X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bombana	4 Dokumen	12,000,000	APBD		4	12,000,000
X	XX	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bombana	12 Bulan	12,000,000	APBD		50	12,000,000
X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bombana	100 'Laporan	300,000,000	APBD		100	300,000,000
X	XX	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bombana	5 Dokumen	58,000,000	APBD		5	58,000,000
X	XX	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bombana	1 Dokumen	54,000,000	APBD		1	54,000,000
X	XX	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		14 Unit	<b>719,000,000</b>	APBD		<b>13</b>	<b>219,000,000</b>
X	XX	1	207	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Bombana	2 Unit	44,000,000	APBD		2	44,000,000
X	XX	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Bombana	2 Unit	20,000,000	APBD		1	20,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

X	XX	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bombana	1 Unit	20,000,000	APBD		1	20,000,000
X	XX	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bombana	3 Unit	60,000,000	APBD		3	60,000,000
X	XX	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bombana	1 Unit	500,000,000	APBD		-	-
X	XX	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bombana	3 Unit	50,000,000	APBD		3	50,000,000
X	XX	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bombana	3 Unit	25,000,000	APBD		3	25,000,000
X	XX	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		336 Laporan	77,000,000	APBD		336	77,000,000
X	XX	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bombana	300 Laporan	10,000,000	APBD		300	10,000,000
X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bombana	12 Laporan	25,000,000	APBD		12	25,000,000
X	XX	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bombana	12 Laporan	30,000,000	APBD		12	30,000,000



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bombana	12 Laporan	12,000,000	APBD		12	12,000,000
X	XX	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	30,715,496,928	APBD		2041	230,789,496,928
X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Bombana	10 Unit	40,000,000	APBD		10	40,000,000
X	XX	1	209	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kab. Bombana	11 'Unit	6,000,000	APBD		11	6,000,000
X	XX	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Bombana	11 'Unit	5,000,000	APBD		11	5,000,000
X	XX	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bombana	1 'Unit	15,000,000	APBD		1	15,000,000
X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bombana	Unit	20,000,000	APBD		1	20,000,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	Kab. Bombana	100	295,000,000	APBD		100	303,500,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	02	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kab. Bombana		295,000,000	APBD		421	303,500,000
8	01	02	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bombana	5 Dokumen	20,000,000	APBD		7	20,000,000
8	01	02	201	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bombana	5 Dokumen	30,000,000	APBD		87	30,000,000
8	01	02	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bombana	150 Orang	75,000,000	APBD		160	75,000,000
8	01	02	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bombana	150 Orang	75,000,000	APBD		155	78,750,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	02	201	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Bombana	5 Laporan	75,000,000	APBD		5	78,750,000
				06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Bombana	5 Keluarga	20,000,000	APBD		7	21,000,000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	Kab. Bombana	100%	6,022,374,232	APBD		100	56,032,374,232
8	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	Jumlah Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan	Kab. Bombana	Dokumen	6,022,374,232	APBD			56,032,374,232

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

					Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik, Etika Budaya, Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/pemilihan Umum kepala daerah, serta pemantauan Situasi Politik							
8	01	03	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bombana	10 Dokumean	50,000,000	APBD		12	52,500,000
8	01	03	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bombana	10 Dokumean	5,692,374,232	APBD		12	55,692,374,232

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	03	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bombana	150 Orang	100,000,000	APBD		155 Orang	105,000,000
8	01	03	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bombana	50 Orang	50,000,000	APBD		70	52,500,000
8	01	03	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Bombana	3 Laporan	130,000,000	APBD		12	130,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Yang Aktif	Kab. Bombana	100	210,000,000	APBD		100	210,000,000
8	01	04	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bombana		210,000,000	APBD			210,000,000
8	01	04	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bombana	3 Dokumen	15,000,000	APBD		7	15,000,000
8	01	04	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bombana	3 Dokumen	20,000,000	APBD		7	20,000,000
8	01	04	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bombana	66 Orang	50,000,000	APBD		68	50,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	04	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bombana	66 Orang	50,000,000	APBD		68	50,000,000
8	01	04	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Bombana	22 Laporan	75,000,000	APBD		22	75,000,000
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kab. Bombana	100	<b>210,000,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100</b>	<b>210,000,000</b>
8	01	05	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Kab. Bombana		<b>210,000,000</b>	<b>APBD</b>			<b>210,000,000</b>

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	05	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bombana	3 Dokumen	15,000,000	APBD	5	15,000,000
8	01	05	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bombana	3 Dokumen	20,000,000	APBD	5	20,000,000
8	01	05	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bombana	66	50,000,000	APBD	68	50,000,000



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	05	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bombana	66	50,000,000	APBD		120	50,000,000
8	01	05	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Bombana	22 laporan	75,000,000	APBD		22	75,000,000
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Konflik yang tertangani	Kab. Bombana	100	<b>920,000,000</b>	APBD		<b>100</b>	<b>920,000,000</b>
8	01	06	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Bombana		<b>920,000,000</b>	APBD			<b>920,000,000</b>

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	06	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bombana	1 Dokumen	20,000,000	APBD		1	20,000,000
8	01	06	201	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bombana	4 Dokumen	75,000,000	APBD		4	75,000,000
8	01	06	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bombana	44	75,000,000	APBD		66	75,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	06	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bombana	70	75,000,000	APBD	70	75,000,000
8	01	06	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Bombana	22 laporan	75,000,000	APBD	22	75,000,000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

8	01	06	201	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bombana	4 Dokumen	600,000,000	APBD		4	600,000,000
									7,657,374,232				57,675,874,232

Rumbia, April 2022

Kepala Badan Bakesbangpol  
Kabupaten Bombana



**dr. H. SUNANDAR. A. RAHIM, MM.Kes**  
Pembina Utama Muda Gol IV/c  
NIP. 19690716 2000031 1

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana tahun 2023 merupakan hasil evaluasi renja SKPD tahun 2021 dan tahun 2022. SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana tidak banyak mengalami perubahan rencana kerja, Indikator Kinerja, Lokasi Kegiatan, maupun sumber anggaran. Terdapatnya beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang ada sehingga program dan kegiatan yang terlaksana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA tahun 2022 merupakan program dan kegiatan prioritas penting dan utama.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2023 kami sampaikan dan diharapkan masukan demi penyempurnaan dan proses lebih lanjut.

Rumbia, April 2022.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kab. Bombana,**



**dr. H. SUNANDAR. A. RAHIM, MM.Kes**

Pembina Utama Muda Gol IV/c  
NIP. 19690716 2000031 004

